

---

**PENGARUH *PERFORMANCE BASED BUDGETING* DAN PENGENDALIAN  
INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGKALAN**

*(EFFECT OF PERFORMANCE BASED BUDGETING AND INTERNAL CONTROL TO  
THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT INSTITUTION OF BANGKALAN)*

**YANTI KURNIANINGSIH**

Magister Management, 17 August 1945 University, Surabaya

**SRIE HARTUTIE MOEHADITOYO**

Department of Accounting, 17 August 1945 University Surabaya

**MULYANTO NUGROHO**

Department of Accounting, 17 August 1945 University Surabaya.

The purpose of this research is to analyze (1) Influence of Performance Based Budgeting to internal control at regency government institution bangkalan madura, (2) Influence of Performance Based Budgeting to performance of regency government institution of bangkalan madura and (3) Influence of internal control to performance of regency government institution bangkalan madura.

Samples in the study were 198 respondents from 33 SKPD Bangkalan Madura calculated using slovin formula. The analysis of this study using. Data analysis in this research using SEM (Structural Equation Modeling) with application of PLS program (Partial Least Square) version 3.0 M3 PLS (Partial Least Square). The result of research indicates that (1) There is significant influence of Performance Based Budgeting on internal control, (2) There is no significant influence of Performance Based Budgeting on the performance of Bangkalan district government institutions and (3) There is significant influence of internal control on the performance of Bangkalan district government institutions

Keywords: Performance Based Budgeting, internal control, government performance

## PENDAHULUAN

Anggaran sektor publik lebih dominan mengacu pada anggaran pemerintah yang terkandung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD. APBN adalah rencana pengeluaran / pengeluaran dan penerimaan / pembiayaan suatu negara dalam periode anggaran tertentu, dimana anggaran akan dialokasikan ke kementerian atau instansi yang ada, sementara APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang dialokasikan untuk Perangkat Perangkat Daerah Unit (SKPD).

Kinerja sektor publik yang baik merupakan kinerja yang bertanggung jawab dan mendukung kepentingan publik yang dapat diimplementasikan melalui akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik sebagai salah satu implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik dalam mewujudkan good governance

Salah satu bentuk reformasi penganggaran adalah penerapan Budget Based Based. Di Indonesia, sistem ini dimandatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan ditetapkan dalam PP no. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Pasal 3 ayat (2) dan PP. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RKAKL) pasal (4), (7), (8).

Penganggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada organisasi dan terkait erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006: 171). Anggaran berbasis kinerja dapat dikatakan baru karena pencapaian hasil merupakan perhatian utama, sehingga menghubungkan alokasi sumber daya atau secara eksplisit mengeluarkan dana dengan hasil yang

diinginkan. Dengan demikian, kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur secara khusus adalah latar belakang alokasi sumber daya, melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan masalah kritis yang dihadapi institusi, kemampuan keagenan, dan masukan dari pemangku kepentingan.

Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep nilai uang dan pengawasan kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja dirancang untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional, terutama kelemahan yang disebabkan oleh kurangnya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian sasaran dan sasaran pelayanan publik (Haryanto, 2007). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan rencana yang telah dipersiapkan. Untuk mengatasi kelemahan kelemahan perlu di kontrol internal dalam penganggaran. Kontrol internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap aset dari limbah, kecurangan dan inefisiensi penggunaan dan untuk meningkatkan akurasi dan tingkat kepercayaan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi bagi kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai pengendalian internasional yang memadai. Pengawasan internal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan internal yang berfungsi untuk melakukan penilaian independen terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang instansi pemerintah

Penelitian Luh Febri Indrayani, Putu Gede Diatmika, Made Arie Wahyuni (2017); Ni Kadek Rina Primayoni, Made Pradana Adiputra, Edy Sujana. (2014); Komang

Budarsana, Edy Sujana, SE, Msi, AK., Gede Adi Yuniarta, SE.AK (2016) memberikan hasil bahwa efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja akuntabilitas organisasi publik dan penelitian Muhammad F.Syawie. , David PESaerang, Winston Pontoh (2016) Penganggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian kinerja; Dewi Kurniasari, Dedeh Kurniasari, M. Sandy Marta (2017) Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, masing-masing Badan Akuntan Keuangan wajib membuat dan menyajikan Laporan Kinerja mengenai kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja memberikan SAKIP secara bertahap, dengan tingkat mulai dari entitas Entitas Akuntabilitas Kinerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Badan Organisasi, kepada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian / Lembaga

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu manifestasi evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semua yang harus diringkas dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta evaluasi terhadap serangkaian program yang telah dinyatakan di awal tahun anggaran serta sebagai batu loncatan dalam mempersiapkan langkah-langkah untuk selanjutnya. tahun. Selain itu, laporan tahunan disusun dalam hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai

kebijakan sehingga seseorang bisa menarik langkah lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diubah, disebutkan bahwa "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan subordinatnya di Pengadilan Negeri, lingkungan Pengadilan Agama, Militer Pengadilan, Badan Usaha Milik Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi ". Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap penyesuaian tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diterbitkan bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum -Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 di Mahkamah Agung

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya merupakan ilustrasi dari pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang meliputi 6 misi, dengan 6 tujuan, 23 Tujuan diimplementasikan. Namun, sesuai dengan maksud dari kompilasi ini adalah laporan prestasi kinerja pada realisasi Visi dan Misi Kabupaten Bangkalan, mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Pemkab Bangkalan lebih spesifik disiapkan sesuai dengan uraian Visi dan Misi Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018. Laporan ini merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas penggunaan berbagai sumber daya, terutama keuangan

dalam proses pemerintahan. Sehingga semua penggunaan sumber daya dicatat tidak hanya oleh pengeluaran sesuai dengan rencana pengeluaran, namun secara signifikan dan efektif berkontribusi terhadap realisasi tujuan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Hasil pengukuran pada 23 Tujuan Strategis Pemerintah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Performance Based Budgeting* berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal pada instansi pemerintah kabupaten bangkalan madura?
2. Apakah *Performance Based Budgeting* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bangkalan madura?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bangkalan madura?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pengaruh *Performance Based Budgeting* terhadap pengendalian internal pada instansi pemerintah kabupaten bangkalan madura
2. Pengaruh *Performance Based Budgeting* terhadap Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bangkalan madura
3. Pengaruh pengendalian internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bangkalan madura

## TELAAH PUSTAKA

### Akuntansi Manajemen

Menurut Rudianto (2013:9) menjelaskan bahwa pengertian akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi dimana informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi. Menurut Hansen dan Mowen (2013:9) akuntansi manajemen merupakan alat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan.

### Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiamso (2002:14), Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik

### Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan system penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Indra Bastian, 2006:202)

### Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017:129) “sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” Sedangkan menurut Krismiaji (2010:218) “Pengendalian Internal (Internal Control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.”

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

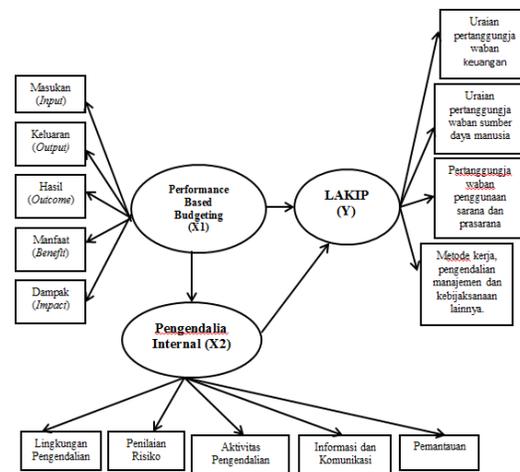
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan perencanaan strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan jajarannya. (Indra, 2001:351) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dimaksudkan untuk *enforcement* agar masing-masing instansi mempunyai visi, misi, dan strategi untuk mencapai program-program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. LAKIP tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai peranan laporan keuangan instansi yang seharusnya menjadi dasar penyusunan LAKIP, padahal seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah bermuara pada keuangan/pendanaan. Oleh karena itu, tatacara penyusunan LAKIP tidak terstruktur, sehingga membutuhkan monitoring yang konsisten.

**METODE PENELITIAN**

**Rancangan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan pada bab II dengan menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif. Kerangka konseptual mencerminkan paradigma dan panduan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini (Mulyanto Nugroho, 2017). Kerangka konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar Kerangka Konseptual Penelitian**



**POPULASI DAN SAMPEL**

Populasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017, 80). Populasi dalam penelitian ini adalah 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana menggunakan pegawai PNS atau Honorer/PTT yang terlibat langsung dalam pembuatan Anggaran, pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjumlah 390 pegawai. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus dari Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

- n = Jumlah sampel seluruh pegawai
- N = Jumlah populasi pegawai
- e<sup>2</sup> = Presisi yang ditetapkan (margin of error) sebesar 5%

$$n = \frac{390}{1 + (390 \times 0.05^2)} = 198 \text{ Pegawai}$$

**Tabel jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

NO	Nama Perangkat Daerah Pemerintah Kalimantan Timur	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Dimas Pendidikan dan Kebudayaan	22	11
2	Dimas Kesehatan	19	10
3	Dimas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	8	4
4	Dimas Perumahan rakyat dan Kawasan Khusus	9	5
5	Dimas Sosial	10	5
6	Dimas Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak	13	7
7	Dimas Ketahanan Pangan	15	8
8	Dimas Lingkungan Hidup	10	5
9	Dimas Kependudukan dan Catatan Sipil	23	12
10	Dimas Perhubungan	15	8
11	Dimas Komunikasi dan Informatika	10	5
12	Dimas Koprasi dan Usaha Kecil Makro	9	5
13	Dimas Pemuda dan Olah Raga	10	5
14	Dimas Kebudayaan dan Pariwisata	13	7
15	Dimas Perpustakaan dan Kearsipan	9	5
16	Dimas Perikanan	11	6
17	Dimas Pertanian dan Pangan Hortikultura dan Perkebunan	25	13
18	Dimas Peternakan	14	7
19	Dimas Perdagangan	9	5
20	Satuan Polisi pamong Praja	23	12
21	Dimas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15	8
22	Dimas Pendapatan Daerah	20	10
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20	10
24	Badan Kepegawaian Daerah	19	7
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	4
26	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	3
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	5
28	BRSUD Bangkalan	11	6
<b>Total</b>		<b>390</b>	<b>198</b>

**JENIS DAN SUMBER DATA**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari responden pada tiap SKPD Kabupaten Bangkalan

**TEKNIK ANALISIS DATA**

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan SEM (*Structural Equation*

*Modelling*) dengan aplikasi program PLS (*Partial Least Square*) versi 3.0 M3 PLS (*Partial Least Square*) dikembangkan pertama kali oleh wold sebagai metode umum untuk mengestimasi *path model* yang menggunakan konstruk laten dengan mutipe indikator. PLS (*Partial Least Square*) merupakan *factor indeterminacy* metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. PLS (*Partial Least Square*) dapat juga digunakan untuk konfirmasi teori.

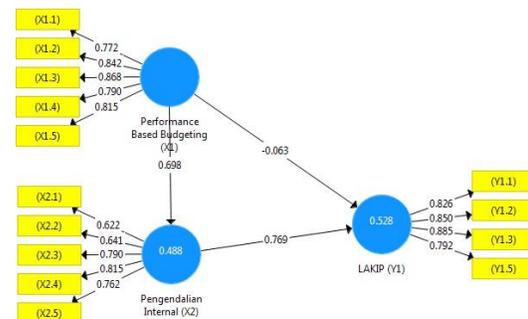
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Data dan Interpretasi**

**Evaluasi Measurement (Outer) Model**

**Uji Validitas**

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* di atas 0,50 terhadap konstruk yang dituju. Output SmartPLS untuk *loading factor* memberikan hasil sebagai berikut:



Gambar Nilai Loading Factor Original Tabel Result For Outer Loading

	LAKIP (Y1)	Pengendalian Internal (X2)	Performance Based Budgeting (X1)
(X1.1)			0.772
(X1.2)			0.842
(X1.3)			0.868
(X1.4)			0.790
(X1.5)			0.815
(X2.1)		0.622	
(X2.2)		0.641	
(X2.3)		0.790	
(X2.4)		0.815	
(X2.5)		0.762	
(Y1.1)	0.826		
(Y1.2)	0.850		
(Y1.3)	0.885		
(Y1.5)	0.792		

Sumber : Data diolah, *Partial Least Square* (PLS) 2.0, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa *loading factor* telah memberikan nilai yang disarankan yaitu lebih 0,5. Berarti indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi *Convergent Validity*. *Discriminant Validity* indikator reflektif dapat dilihat pada *Cross-Loading* antara indikator dengan konstraknya dengan menggunakan PLS Algorithm report pilih *Dicriminant Validity* lalu cross loading berikut ini output smartPLS.

Tabel Discriminant Validity Cross-Loading

	LAKIP (Y1)	Pengendalian Internal (X2)	Performance Based Budgeting (X1)
(X1.1)	0.344	0.520	0.772
(X1.2)	0.435	0.596	0.842
(X1.3)	0.381	0.591	0.868
(X1.4)	0.405	0.524	0.790
(X1.5)	0.369	0.617	0.815
(X2.1)	0.340	0.622	0.475
(X2.2)	0.348	0.641	0.492
(X2.3)	0.529	0.790	0.573
(X2.4)	0.734	0.815	0.486
(X2.5)	0.605	0.762	0.539
(Y1.1)	0.826	0.604	0.429
(Y1.2)	0.850	0.583	0.379
(Y1.3)	0.885	0.647	0.387
(Y1.5)	0.792	0.595	0.395

Sumber : Data diolah, *Partial Least Square* (PLS) 2.0, 2017

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* tertinggi kepada Variabel yang dituju dibandingkan *loading factor* kepada variabel lain. Tabel di atas

menunjukkan bahwa *loading factor* untuk variabel Performance Based Budgeting (X1) dengan indikator X1.1 – X1.5 lebih tinggi dari indikator yang ada pada variabel yang lain. Dengan demikian, kontak laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok yang lain. Metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE). Nilai yang disarankan adalah di atas 0,5. Berikut adalah nilai AVE dalam penelitian ini:

Tabel Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
LAKIP (Y1)	0.704
Pengendalian Internal (X2)	0.533
Performance Based Budgeting (X1)	0.669

Sumber : Data diolah, *Partial Least Square* (PLS) 2.0, 2017

Tabel di atas memberikan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0.5 untuk semua variabel yang terdapat pada model penelitian.

### Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Composite Reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *Composite Reliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0.7. Berikut adalah nilai *Composite Reliability* pada output:

Tabel *Composite Reliability*

	Composite Reliability
LAKIP (Y1)	0.905
Pengendalian Internal (X2)	0.849
Performance Based Budgeting (X1)	0.910

Sumber : Data diolah, *Partial Least Square (PLS) 2.0*, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk semua Variabel di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua variabel pada model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity*.

Uji reliabilitas juga bisa diperkuat dengan *Cronbach's Alpha* di mana Nilai yang disarankan adalah di atas 0,5 dan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua konstruk berada di atas 0,5. Berikut output SmartPLS Versi 3.0:

Tabel *Cronbach's Alpha*

	Cronbach's Alpha
LAKIP (Y1)	0.859
Pengendalian Internal (X2)	0.778
Performance Based Budgeting (X1)	0.876

Sumber : Data diolah, *Partial Least Square (PLS) 2.0*, 2017

### Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *Outer Model*, berikutnya dilakukan pengujian model struktural (*Inner model*). Berikut adalah nilai *R-Square* pada konstruk:

Tabel *R-Square*

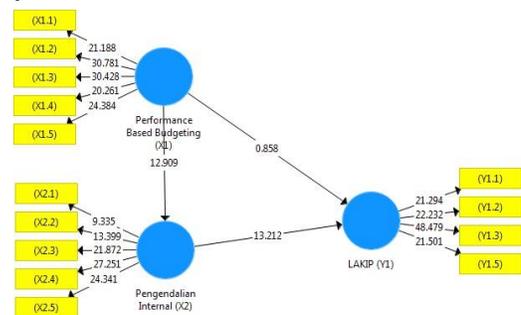
	R Square	R Square Adjusted
LAKIP (Y1)	0.528	0.523
Pengendalian Internal (X2)	0.488	0.485

Sumber : Data diolah, *Partial Least Square (PLS) 2.0*, 2017

*R Square* ( $R^2$ ) sering disebut dengan koefisien determinasi, adalah mengukur kebaikan suai (*goodness of fit*) dari persamaan regresi; yaitu memberikan

proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalau  $R^2$  semakin mendekati 1. Tabel  $R^2$  di atas memberikan nilai 0.488 untuk variabel Pengendalian Internal (X2) yang berarti bahwa Performance Based Budgeting (X1) mampu dijelaskan Pengendalian Internal (X2) sebesar 48.8 % dan sisanya 51.2 % tidak dijelaskan dalam penelitian ini dan nilai 0.735021 untuk variabel LAKIP (Y1) yang berarti bahwa Performance Based Budgeting (X1) dan Pengendalian Internal (X2) mampu dijelaskan LAKIP (Y1) sebesar 52.8 % dan sisanya 47.2 % tidak dijelaskan dalam penelitian ini

Untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan melihat signifikansi pengaruh antar variable dengan melihat koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistic. Pada PLS2.0 hal tersebut dilakukan dengan melihat *Algorithm Bootstrapping report*, berikut hasilnya :



Gambar *Algorithm Bootstrapping report* Tabel Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) :

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O /STDEV)	P Values
Pengendalian Internal (X2) -> LAKIP (Y1)	0.769	0.777	0.058	13.212	0.000
Performance Based Budgeting (X1) -> LAKIP (Y1)	-0.063	-0.071	0.074	0.858	0.391
Performance Based Budgeting (X1) -> Pengendalian Internal (X2)	0.698	0.700	0.054	12.909	0.000

Sumber : Data diolah, *Partial Least Square (PLS) 2.0*, 2017

*Path Coefficient* menunjukkan tingkat signifikansi hubungan antar variabel dalam

penelitian. Dengan demikian memberikan hasil sebagai berikut :

**H1 : Terdapat Pengaruh signifikan Performance Based Budgeting terhadap pengendalian internal**

Berdasarkan hasil olah data menggunakan PLS 3.0 memberikan hasil bahwa Pengaruh *Performance Based Budgeting* terhadap pengendalian internal adalah signifikan dengan T-statistik sebesar  $12.909 > 1,96$ . Dengan nilai *original sample estimate* sebesar 0.698 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara *Performance Based Budgeting* terhadap pengendalian internal adalah positif atau satu arah. Dengan demikian teori yang dikemukakan Mardiasmo (2009:12) dimana anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana financial yang menyatakan: (1) Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak; dan (2) Bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan) dan Menurut Bastian (2006:171) anggaran berbasis kinerja adalah : “perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut.” serta menurut Darise (2008:146) anggaran berbasis kinerja adalah : “penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.” sedangkan

Pengendalian Internal menurut *The Committee of Sponsoring Organizations of The Tradeway Commission* dalam Beyond COSO “*Internal Control to enhance corporate governance*” oleh Halim (1997) sebagai berikut: “*Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management and other personnel, design to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations; reliability of financial reporting, and compliance with laws and regulations*”. Definisi diartikan sebagai berikut pengendalian internal sebagai proses, dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel perusahaan, yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yang digolongkan menjadi : 1. Dapat dipercayanya laporan keuangan. 2. Kepatuhan dengan hukum dan aturan yang berlaku. 3. Efisiensi dan efektivitas operasi. Penjelasan secara teroris sangat mendukung dalam penelitian ini, apabila *Performance Based Budgeting* dilakukan dengan baik artinya terdapat perencanaan yang sesuai SOP maka pengendalian internal juga mampu dilakukan dengan baik, sehingga Pengendalian internal berfungsi efektif dan bukan semata-mata berupa kebijakan bersifat manual serta melibatkan berbagai macam formulir akan tetapi juga melibatkan orang-orang yang ada di dalam organisasi termasuk Kepala dinas, Kepala bidang dan staff yang lainnya.

**H2 : Tidak Terdapat Pengaruh signifikan Performance Based Budgeting terhadap LAKIP**

Berdasarkan hasil olah data menggunakan PLS 3.0 memberikan hasil bahwa Pengaruh *Performance Based Budgeting* terhadap LAKIP adalah tidak signifikan dengan T-

statistik sebesar  $0.858 < 1,96$ . Nilai *original sample estimate* sebesar  $-0.063$  yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara *Performance Based Budgeting* terhadap LAKIP adalah negatif atau berlawanan arah. Dengan demikian teori yang dikemukakan Mardiasmo (2009:12) dimana anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter disisi lainnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Seharusnya penjelasan secara teoritis sangatlah mendukung, namun dalam penelitian ini terolak karena pada hakikatnya *Performance Based Budgeting* merupakan proses penyusunan dalam mengestimasi anggaran yang akan diterapkan pada tahun berikutnya namun khususnya pada kabupaten bangkalan sering terjadi penambahan anggaran kegiatan dibulan juni karena terjadi kegiatan yang bersifat *temporary* sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir kinerja keuangan tidak berkaitan dengan *Performance Based Budgeting*

**H3 : Terdapat pengaruh signifikan pengendalian internal terhadap LAKIP**

Pengaruh pengendalian internal terhadap LAKIP adalah signifikan dengan T-statistik sebesar  $13.212 > 1,96$ . Nilai *original sample estimate* sebesar  $-0.769$  yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara pengendalian internal terhadap LAKIP adalah positif atau satu arah. Dalam hal ini Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur-unsur, namun hendaknya tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem. Menurut The Committee of Sponsoring Organizations of The Tradeway Commission atau COSO (Arens, 2008) menguraikan lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Setiap komponen mengandung banyak pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Komponen pengendalian internal COSO meliputi hal-hal berikut ini : 1. Lingkungan pengendalian (control environment). 2. Penilaian risiko (risk assessment). 3. Aktivitas pengendalian (control activities). 4. Informasi dan komunikasi (information and communication). 5. Pemantauan (monitoring) apabila setiap pengendalian ini tidak dilakukan dengan maksimal atau mengalami penurunan atau kecurangan maka semakin tinggi tingkat kesalahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan output dari kinerja keuangan pada setiap SKPD yang ada dibangkalan madura.

#### SIMPULAN

Bedasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh Pengaruh *Performance Based Budgeting*

Dan Pengendalian Internal Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Pengaruh signifikan *Performance Based Budgeting* terhadap pengendalian internal apabila *Performance Based Budgeting* dilakukan dengan baik artinya terdapat perencanaan yang sesuai SOP maka pengendalian internal juga mampu dilakukan dengan baik, sehingga Pengendalian internal berfungsi efektif dan bukan semata-mata berupa kebijakan bersifat manual serta melibatkan berbagai macam formulir akan tetapi juga melibatkan orang-orang yang ada di dalam organisasi termasuk Kepala dinas, Kepala bidang dan staff yang lainnya
2. Tidak Terdapat Pengaruh signifikan *Performance Based Budgeting* terhadap LAKIP. *Performance Based Budgeting* merupakan proses penyusunan dalam mengestimasi anggaran yang akan diterapkan pada tahun berikutnya namun khususnya pada kabupaten bangkalan sering terjadi penambahan anggaran kegiatan dibulan juni karena terjadi kegiatan yang bersifat *temporary* sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir kinerja kinerja keuangan tidak berkaitan dengan *Performance Based Budgeting*
3. Terdapat pengaruh signifikan pengendalian internal terhadap

LAKIP. Semakin tinggi Pemantauan (monitoring) dalam pengendalian ini tidak dilakukan dengan maksimal atau mengalami penurunan atau kecurangan maka semakin tinggi tingkat kesalahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan output dari kinerja keuangan pada setiap SKPD yang ada dibangkalan madura

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Afilu Hidayattullah, Irine Herdjiono, 2015, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Skpd Di Merauke,. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & *Call For Papers* Unisbank (Sendi\_U) *Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat* ISBN: 978-979-3649-81-8
- Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder, 2012, Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, 1.3th Edition, Pearson Prentice Hall
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), "AICPA's Statements on Auditing Standards (SAS) 58 - AU Section 508", 1989.
- Anggraini, Yunita dan Puranto Hendra. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja; Penyusunan APBD Secara

- Komprehensif. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Bambang Sancoko, 2008, “Kajian terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia”, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI
- Bambang, Riyanto, 2001. Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Dwi Ratmono, Rita Suryani. 2016, Anteseden Dan Konsekuensi Keberhasilan Implementasi *Performance-Based Budgeting* Pada Pemerintah Daerah, Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 20(1) Juni 2016
- Fahmi, Irham. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta
- Hansen, Don R., dan Maryanne M. Mowen. 2013. Akuntansi Manajerial. Edisi. Kedelapan. Buku 1
- Harahap, Sofyan Syafri, 2013, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Cetakan Kesebelas, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Harty seperti yang dikutip oleh Nasir dkk, dalam *Prosiding Seminar Nasional : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, 2003, hlm 44-45*
- Horne, James C. Van dan John M Wachowicz Jr. 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Edisi 13). Jakarta : Salemba Empat
- Horngren, Charles T., et al. 2008. Akuntansi Biaya. Edisi 7. PT INDEKS kelompok GRAMEDIA: Jakarta
- Luh Febri Indrayani, Putu Gede Diatmika, Made Arie Wahyuni. 2017, Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar), e-Journal *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI* (Vol: 8 No. 2 Tahun 2017)
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Martono dan Agus Harjito. 2008. Manajemen Keuangan. Yogyakarta : EKONISIA
- Muhammad Firdiansyah Adiwirya, I Putu Sudana, 2015. Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, ISSN: 235202-8429 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.2 (2015): 611-628 611
- Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi. 2017. Sistem Akuntansi, Edisi ke-4, Cetakan ke-3. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyanto Nugroho, Srie Hartutie Moehaditoyo, Khoirul Anam. 2017. The System Of Investment Decision Making Throughanalysis Of Stock Portfolio Performancebased Single Index Model (Comparison Study Of Shariah Stocks And Conventional Stocks). ISSN: 1992-8645. www.jatit.org E-ISSN :1817-3195. Journal of Theoretical and Applied Information Technology
- Ni Kadek Rina Primayoni, Made Pradana Adiputra, Edy Sujana. 2014, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan

Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung), e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)

Philip G. Joyce and Susan Sieg, Using Performance Information for Budgeting: Clarifying the Framework and Investigating Recent State Experience, unpublished paper prepared for the 2000 Symposium of the Center for Accountability and Performance of the American Society for Public Administration.

Rudianto. 2013. Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Jakarta: Erlangga

Seto Wibisono, Ikhsan Budi Riharjo. 2016, Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 9, September 2016

Siregar, Baldric, Suropto, Bambang, dkk, 2013, “Akuntansi Biaya”, Edisi kedua, Bab 2,7,9-11, Salemba Empat, Jakarta

Sudana, I. 2011. Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek. Jakarta : Erlangga.

Tunggal, Amin Widjaja. 2010. Dasar-Dasar Audit Internal Pedoman Untuk Auditor Baru. Elvira CV. Bandung